



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015873.AH.01.07.TAHUN 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN JARPUK KABUPATEN WONOSOBO**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris PULUNGONO HANDOKO, SH., MKN. , sesuai salinan Akta Nomor 10 Tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat oleh PULUNGONO HANDOKO, SH., MKN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan JARPUK KABUPATEN WONOSOBO tanggal 03 November 2017 dengan Nomor Pendaftaran 6017110333100136 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan JARPUK KABUPATEN WONOSOBO;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN JARPUK KABUPATEN WONOSOBO
Berkedudukan di KABUPATEN WONOSOBO, sesuai salinan Akta Nomor 10 Tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat oleh PULUNGONO HANDOKO, SH., MKN. , yang berkedudukan di KABUPATEN WONOSOBO.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 November
2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 03 November 2017



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015873.AH.01.07.TAHUN 2017**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN JARPUK KABUPATEN WONOSOBO**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
NUKE MAYA KURNIANINGSIH	3307094702740005	PENGURUS	KETUA
ARI SADIAH	3307064403680001	PENGURUS	SEKRETARIS
ALYAH NURROHMAH	3307085804740002	PENGURUS	BENDAHARA
ENI	3307096802650001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 November
2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 03 November 2017